

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KETIDAKSETARAAN GENDER DI WILAYAH PESISIR BANGLADESH DAN PERAN UN WOMEN MELALUI PROGRAM EMPOWER**

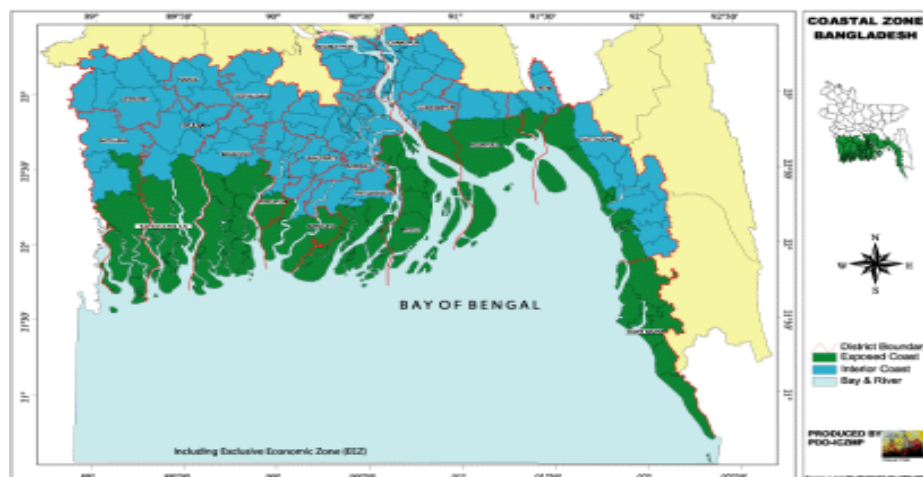
Bab ini membahas gambaran umum mengenai peran UN Women melalui program EmPower fase pertama (2018 - 2022) di wilayah pesisir Bangladesh. Pemaparan dalam bab ini difokuskan pada mandat dan strategi UN Women di Bangladesh, pelaksanaan program EmPower sebagai respons terhadap ketimpangan gender, serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya di tingkat lokal. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran faktual mengenai konteks kelembagaan dan programatik yang melatarbelakangi strategi UN Women dalam mengatasi hambatan ekonomi perempuan di wilayah pesisir Bangladesh.

Sebagai landasan kontekstual, bab ini juga menguraikan secara ringkas kondisi sosial - kultural masyarakat pesisir Bangladesh yang membentuk kerentanan perempuan, termasuk norma gender dan keterbatasan akses ekonomi yang menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program. Pemahaman atas konteks lokal ini menjadi penting sebagai pijakan empiris untuk memahami mengapa strategi tertentu dipilih oleh UN Women, sekaligus menjadi dasar analisis pada bab selanjutnya yang akan menelaah secara lebih mendalam bagaimana strategi tersebut dijalankan dalam menghadapi kompleksitas di lapangan.

## 2.1 Konteks Gender di Wilayah Pesisir Bangladesh

### 2.1.1 Karakteristik Sosial - Ekologis Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir Bangladesh mencakup sekitar 19 distrik dengan jumlah penduduk lebih dari 35 juta jiwa, atau hampir 30 persen dari total populasi nasional (World Bank, 2022). Secara geografis, kawasan ini berada di dataran rendah delta sungai yang berbatasan langsung dengan Teluk Benggala, sehingga sangat rentan terhadap siklon tropis, banjir rob, dan intrusi air asin. *Bangladesh Climate and Development Report* menegaskan bahwa wilayah pesisir menanggung risiko iklim yang jauh lebih besar dibandingkan wilayah lain di dalam negeri, terutama akibat kenaikan permukaan laut dan intensitas badai yang terus meningkat (World Bank, 2022).



**Gambar 2.1 Zona Lokasi Pesisir Bangladesh**

*sumber: ICZMP 2005*

Wilayah pesisir Bangladesh tidak hanya ditandai oleh kerentanan ekologis dan ekonomi, tetapi juga oleh struktur sosial yang terorganisasi secara hierarkis dan berbasis gender. Ketergantungan masyarakat terhadap sektor perikanan, pertanian, dan budidaya udang yang maskulin secara kultural turut memperkuat pembagian kerja berbasis gender. Kondisi sosial ini menjadi tantangan struktural bagi UN Women dalam merancang strategi yang melampaui sekadar intervensi teknis-ekonomi.

Struktur sosial di wilayah pesisir terorganisasi secara hierarkis dan berbasis gender. Dalam banyak komunitas, hubungan sosial dibangun melalui sistem patronase lokal, struktur keluarga patriarkal, serta norma agama dan adat yang membatasi ruang gerak perempuan. Karakteristik sosial dan ekologis yang saling memperkuat ini menjadi pondasi analisis mengapa Program EmPower dirancang dengan pendekatan yang sekaligus menyentuh dimensi ekonomi dan normatif bukan sekadar menyediakan teknologi atau modal, tetapi mendorong perubahan relasi gender yang lebih struktural di wilayah tersebut..

### 2.1.2 Hambatan Gender dan Ekonomi Perempuan Pesisir

Perempuan di wilayah pesisir Bangladesh menghadapi hambatan struktural yang berakar pada norma sosial dan budaya yang telah lama mengatur pembagian peran antara laki - laki dan perempuan. Salah satu norma yang paling berpengaruh adalah praktik purdah, yakni sistem pemisahan ruang sosial yang membatasi mobilitas perempuan di ruang publik dan interaksi lintas gender. Dalam kehidupan sehari - hari,

pembatasan ini tampak pada keharusan perempuan untuk mendapat izin dari suami atau anggota keluarga laki - laki sebelum menghadiri pertemuan komunitas, mengakses fasilitas layanan, maupun terlibat dalam kegiatan ekonomi di luar rumah. Kondisi ini secara langsung mempersempit ruang gerak perempuan untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan maupun aktivitas ekonomi produktif.

Hambatan normatif tersebut semakin diperkuat oleh struktur relasi kuasa dalam rumah tangga yang bersifat patriarkal. Meskipun perempuan kerap terlibat aktif di sektor informal dan usaha kecil, kontrol atas pendapatan yang mereka hasilkan kerap kali tetap berada di tangan suami (World Bank, 2022). Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kepemilikan aset atas nama perempuan, baik berupa tanah maupun properti produktif, yang mempersempit posisi tawar mereka dalam urusan ekonomi keluarga (The World Bank, 2019). Akibatnya, kontribusi ekonomi perempuan tidak serta - merta berbanding lurus dengan kemandirian finansial mereka di tingkat rumah tangga.

Keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal turut memperlemah posisi ekonomi perempuan pesisir. *Data Global Findex World Bank* (2021) menunjukkan masih adanya kesenjangan kepemilikan rekening bank antara laki - laki dan perempuan di Bangladesh, meskipun selisihnya mulai menyempit dalam beberapa tahun terakhir. Keterbatasan ini menghambat kemampuan perempuan untuk mengelola pendapatan secara mandiri, mengakses modal usaha, maupun membangun ketahanan

finansial jangka panjang. Di wilayah pesisir yang rentan terhadap guncangan ekonomi akibat perubahan iklim, penguasaan atas sumber daya keuangan menjadi faktor penentu yang sangat krusial dalam strategi bertahan hidup rumah tangga.

Norma purdah merupakan salah satu praktik sosial yang masih berakar kuat dalam kehidupan masyarakat pedesaan Bangladesh, termasuk di kawasan pesisir. Secara konseptual, purdah merujuk pada sistem pemisahan ruang sosial antara laki - laki dan perempuan yang menekankan nilai kesopanan, pembatasan interaksi lintas gender, serta pengendalian mobilitas perempuan di ruang publik. Meskipun tidak tercantum dalam hukum formal negara, norma ini berfungsi sebagai aturan sosial yang mendapat legitimasi melalui adat istiadat, interpretasi keagamaan, dan tekanan komunitas. Berbagai kajian gender di Bangladesh mengungkapkan bahwa purdah beroperasi sebagai mekanisme sosial yang secara nyata membatasi akses perempuan terhadap ruang publik, peluang kerja di luar rumah, serta jaringan sosial yang lebih luas (Kabeer, 2000).

Dalam kehidupan sehari - hari, pembatasan mobilitas tersebut tampak pada keharusan perempuan untuk mendapat izin dari suami atau anggota keluarga laki - laki sebelum pergi ke pasar, fasilitas kesehatan, maupun pertemuan komunitas. *Bangladesh Demographic and Health Survey* (BDHS) 2017–18 mencatat bahwa tidak semua perempuan menikah memiliki otonomi penuh dalam memutuskan kunjungan ke fasilitas kesehatan secara mandiri; sebagian besar keputusan tersebut

diambil bersama suami atau sepenuhnya berada di tangan suami (NIPORT & ICF, 2019). Meskipun partisipasi perempuan dalam pendidikan dan beberapa sektor pekerjaan telah mengalami peningkatan, kontrol atas mobilitas perempuan masih menjadi bagian dari dinamika rumah tangga yang berlangsung. Kondisi ini lebih menonjol di wilayah pedesaan dibandingkan perkotaan, sebagaimana dicatat dalam laporan UN Women Bangladesh (2022).

Pembatasan ruang gerak ini juga berimplikasi langsung terhadap partisipasi ekonomi perempuan. *Labour Force Survey 2022* mencatat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Bangladesh hanya berkisar 36–37% jauh di bawah laki - laki yang melampaui angka 80% (Bangladesh Bureau of Statistics, 2022). Perempuan yang bekerja sebagian besar terserap di sektor informal, pekerjaan berbasis rumah tangga, atau industri yang dianggap selaras dengan norma sosial yang berlaku. Di wilayah pesisir khususnya, perempuan umumnya terlibat dalam pengolahan hasil laut skala rumah tangga atau usaha kecil berbasis komunitas, sementara pekerjaan yang menuntut mobilitas tinggi seperti penangkapan ikan di laut tetap didominasi oleh laki - laki.

Di luar dampak ekonomi, norma purdah turut memengaruhi akses perempuan terhadap informasi dan layanan dasar. Akses air dan sanitasi di Bangladesh menunjukkan bahwa perempuan di wilayah yang rentan terhadap menanggung beban domestik tambahan, terutama dalam pengumpulan air bersih ketika intrusi air asin terjadi yang menjadikan

adanya hambatan ekonomi bagi perempuan (Unicef, 2021). Dalam situasi bencana seperti siklon, keterbatasan mobilitas yang diperkuat oleh norma sosial dapat memperlambat kemampuan perempuan untuk menjangkau tempat evakuasi atau memperoleh bantuan darurat. Dengan demikian, pembatasan mobilitas bukan sekadar persoalan budaya, melainkan membawa konsekuensi nyata terhadap keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan perempuan di kawasan pesisir.

Secara keseluruhan norma purdah di wilayah pesisir Bangladesh berfungsi sebagai sistem pengaturan sosial yang membentuk pola relasi gender dalam kehidupan sehari - hari. Norma ini tidak selalu berlaku seragam di setiap wilayah, namun tetap menjadi acuan sosial yang kuat dalam mendefinisikan peran dan batas ruang perempuan. Pembatasan mobilitas yang lahir dari praktik tersebut berdampak pada partisipasi ekonomi, keterjangkauan layanan, serta keterlibatan perempuan di ruang publik. Keberlangsungan norma purdah dan pembatasan mobilitas ini tidak lepas dari peran aktor - aktor sosial di tingkat komunitas yang berfungsi sebagai penjaga nilai tradisional, yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya.

### 2.1.3 Peran Aktor Lokal sebagai Tantangan Normatif

Struktur sosial di komunitas pesisir Bangladesh tidak hanya dibentuk oleh norma informal dalam lingkup rumah tangga, tetapi juga

oleh kehadiran aktor lokal yang memiliki legitimasi sosial sekaligus berperan sebagai pengatur norma di tingkat komunitas. Tokoh masyarakat seperti matubars (pemimpin desa) dan anggota *Union Parishad* memegang peran penting dalam menentukan pola interaksi sosial serta distribusi sumber daya di level komunitas. Dalam praktik sehari - hari mereka kerap menjadi rujukan utama ketika terjadi sengketa, perencanaan komunitas, maupun distribusi bantuan pasca bencana sehingga secara nyata mempengaruhi cara norma sosial dipertahankan dan diterjemahkan di tingkat lokal. Lembaga pemerintahan formal di tingkat lokal sering kali bersinggungan dengan struktur informal ini, sehingga hubungan antara pemerintah dan masyarakat tidak semata bersifat administratif, melainkan juga normatif (BBC News Indonesia, 2021).

Peran pemuka agama juga sangat berpengaruh dalam dinamika sosial masyarakat pesisir, terutama di komunitas yang mayoritas beragama Islam. Figur seperti imam masjid menjadi sumber legitimasi moral dan sosial bagi banyak warga, sehingga interpretasi mereka terhadap ajaran agama kerap dijadikan acuan dalam menentukan perilaku sosial yang dianggap “benar”. Penelitian tentang gender dan agama di Bangladesh menunjukkan bahwa norma purdah yang diinterpretasikan dalam konteks patriarkal secara nyata membatasi ruang gerak perempuan sekaligus mempertahankan ketergantungan ekonomi mereka terhadap laki - laki (Bhatia et al., 2024). Kondisi ini pada gilirannya mereproduksi ekspektasi sosial yang mengukuhkan pembatasan mobilitas perempuan, pembagian

kerja domestik yang terpusat pada lingkup keluarga suami, serta norma kesopanan tradisional yang terus diwariskan tanpa mengalami perubahan struktural yang berarti. Ceramah rutin di masjid serta kegiatan keagamaan komunitas menjadi saluran penting bagi penyebaran dan pelanggaran norma - norma tersebut.

Peran aktor lokal juga terlihat dalam proses alokasi bantuan dan pelaksanaan program pembangunan di komunitas pesisir. Dalam hal ini, perempuan yang tidak memiliki kedekatan dengan jaringan tersebut berpotensi menghadapi hambatan tambahan dalam mengakses dukungan program. Hubungan semacam itu terbentuk melalui struktur perlindungan sosial yang kuat dimana aktor lokal berperan sebagai perantara sekaligus penjaga norma dan sumber daya.

Mekanisme mediasi informal seperti *shalish* juga memperlihatkan bagaimana norma sosial direproduksi melalui peran aktor lokal. *Shalish* merupakan forum mediasi komunitas yang umumnya dipimpin oleh tetua desa atau tokoh laki - laki senior untuk menyelesaikan konflik lokal, baik menyangkut sengketa keluarga maupun perselisihan lahan. Berbagai penelitian tentang *shalish* menegaskan bahwa forum ini cenderung memperkuat norma patriarkal, mengingat kepemimpinannya didominasi oleh laki - laki dan keputusan yang dihasilkan kerap mencerminkan nilai serta struktur sosial tradisional (Siddiqui, 2018). Dengan demikian, mekanisme pengambilan keputusan informal di tingkat desa turut membentuk pola relasi gender secara normatif.

Secara keseluruhan, aktor lokal seperti tokoh masyarakat dan pemuka agama memegang peran sentral dalam memelihara, mentransmisikan, dan melanggengkan norma sosial yang berkaitan dengan pembagian peran gender serta pembatasan mobilitas perempuan di wilayah pesisir Bangladesh. Otoritas sosial mereka tidak sekadar bersifat simbolik, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap akses masyarakat atas sumber daya, peluang ekonomi, dan partisipasi sosial. Dalam konteks implementasi program pembangunan, termasuk intervensi pemberdayaan perempuan, struktur aktor lokal ini menjadi arena negosiasi antara norma tradisional dan perubahan sosial yang dibawa oleh program dari luar komunitas.

## **2.2 UN Women di Bangladesh**

### **2.2.1 Mandat dan Fokus Intervensi UN Women di Bangladesh**

UN Women di Bangladesh menjalankan mandatnya dalam kerangka kerja yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan komitmen global terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 5 tentang kesetaraan gender. Dalam dokumen *UN Women Strategic Note Bangladesh 2022–2026*, organisasi ini menetapkan fokus pada penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan, penghapusan kekerasan berbasis gender, peningkatan partisipasi politik perempuan, serta integrasi perspektif gender dalam aksi iklim dan penanggulangan bencana (Dhaka Tribune, 2026). Kerangka tersebut disusun dengan mempertimbangkan konteks nasional Bangladesh yang menghadapi

ketimpangan gender struktural serta kerentanan tinggi. Implementasi program dilakukan melalui kemitraan dengan kementerian terkait, organisasi masyarakat sipil, lembaga pembangunan internasional, serta komunitas lokal.

Dalam bidang pemberdayaan ekonomi perempuan, UN Women mendukung peningkatan akses perempuan terhadap keterampilan, pembiayaan, dan peluang pasar. Data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan berada pada kisaran 36% pada 2022, sementara laki - laki mencapai lebih dari 80% (Sayema Haque Bidisha, 2022). Selain itu, sebagian besar perempuan bekerja di sektor informal dengan perlindungan sosial yang terbatas (ILO, 2021). Melihat dari permasalahan yang ada UN Women mengembangkan program pelatihan kewirausahaan, peningkatan kapasitas usaha kecil, serta penguatan rantai nilai yang inklusif gender, terutama di wilayah pedesaan dan wilayah rentan bencana.

Pada bidang tata kelola pemerintahan, UN Women mendukung peningkatan partisipasi dan kepemimpinan perempuan khususnya di tingkat lokal. Meskipun Bangladesh memiliki kuota 50 kursi khusus perempuan di parlemen nasional (21% total MPs), Melalui program penguatan kapasitas dan pelatihan kepemimpinan, UN Women berupaya meningkatkan kemampuan perempuan untuk berpartisipasi secara efektif dalam struktur pemerintahan lokal. Pendekatan ini juga mencakup

dukungan terhadap kebijakan yang responsif gender serta integrasi anggaran berbasis gender dalam perencanaan pembangunan.

Selain pemberdayaan ekonomi, UN Women juga menangani isu kekerasan berbasis gender dan partisipasi politik perempuan sebagai bagian dari mandatnya yang lebih luas. Namun dalam konteks penelitian ini, fokus diarahkan pada strategi yang bersentuhan langsung dengan hambatan ekonomi perempuan: akses terhadap keterampilan, pembiayaan, dan peluang pasar. Terkait isu perubahan iklim, UN Women menempatkan pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai inti dari strategi ketahanan iklim, mengingat perempuan di wilayah pesisir justru menghadapi hambatan ekonomi yang lebih berat akibat keterbatasan mobilitas dan akses sumber daya di tengah tekanan ekologis yang tinggi (World Bank, 2022). Dengan demikian, strategi ekonomi UN Women di Bangladesh tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan ekologis yang membentuk hambatan yang dihadapi perempuan di lapangan. Implementasi program dilakukan melalui kemitraan dengan kementerian terkait, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal.

### 2.2.2 Kerangka Kelembagaan dan Mitra Strategis UN Women

Dalam menjalankan mandatnya di Bangladesh, UN Women tidak bergerak secara terpisah melainkan berada dalam kerangka kerja yang selaras dengan agenda pembangunan nasional dan internasional. Landasan utamanya adalah *United Nations Sustainable Development Cooperation Framework* (UNSDCF) 2022–2026 yang disinergikan dengan Rencana

Pembangunan Lima Tahun Kedelapan (8th Five Year Plan) Pemerintah Bangladesh. Keselarasan ini memastikan bahwa berbagai program UN Women termasuk EmPower memiliki legitimasi kelembagaan serta dukungan politik yang jelas dari tingkat pusat hingga daerah (United Nations Bangladesh, 2021). Dalam hal ini, UN Women berperan sebagai mitra teknis yang menyediakan keahlian dalam integrasi perspektif gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan lintas sektor.



**Gambar 2.2 Proyek Pemberdayaan Wanita untuk  
Pertumbuhan Inklusif (WING)**

*Sumber: Un Bangladesh*

Keberhasilan implementasi Program EmPower Fase 1 ditentukan juga dengan kolaborasi lintas kementerian. UN Women bekerja sama secara intensif dengan *Ministry of Women and Children Affairs* (MoWCA) serta Kementerian Lingkungan Hidup, Hutan, dan Perubahan Iklim (MoEFCC). Melalui kemitraan ini, upaya peningkatan ketahanan iklim

dan transisi energi terbarukan di Bangladesh diupayakan tetap responsif terhadap kebutuhan dan pengalaman perempuan (UNEP, 2020). Pelibatan institusi pemerintah menjadi strategi penting agar prinsip kesetaraan gender tidak berhenti pada tataran program, tetapi dapat terintegrasi dalam kebijakan publik dan mekanisme birokrasi negara.

Bukan hanya kerjasama dengan pemerintah, UN Women juga membangun kemitraan strategis dengan organisasi internasional lain untuk memperluas jangkauan dan dampak program. Kolaborasi dengan *United Nations Environment Programme* (UNEP) menjadi salah satu elemen kunci karena menggabungkan pendekatan lingkungan dengan perspektif keadilan gender. Langkah ini memungkinkan integrasi antara dukungan teknis seperti pengembangan energi bersih dengan penguatan kapasitas sosial dan ekonomi perempuan di wilayah pesisir (UNEP, 2022). Pendekatan multilateral semacam ini mencerminkan upaya kolektif dalam merespons persoalan yang saling terkait antara isu gender dan krisis iklim di kawasan Asia Pasifik.

Pada level implementasi lapangan, UN Women juga menggandeng organisasi non - pemerintah dan kelompok masyarakat sipil lokal. Aktor - aktor ini berfungsi sebagai penghubung antara agenda global dengan dinamika sosial - budaya masyarakat pesisir Bangladesh yang relatif konservatif. Melalui kemitraan lokal, pendekatan program dapat disesuaikan dengan konteks nilai dan norma setempat, sehingga proses penerimaan terhadap gagasan kesetaraan gender dapat berlangsung secara

lebih gradual dan kontekstual (Hossain & Kabeer, 2022). Secara keseluruhan, konfigurasi kelembagaan ini membentuk sistem dukungan yang terstruktur, mulai dari kerangka kebijakan tingkat nasional hingga praktik implementasi di tingkat komunitas.

## **2.3 Program EmPower Fase 1 sebagai Fokus Penelitian**

### **2.3.1 Latar Belakang dan Tujuan Program EmPower**

Program EmPower dirancang oleh UN Women dan UNEP sebagai respons terhadap hambatan ekonomi struktural yang dihadapi perempuan di wilayah pesisir Bangladesh. Hambatan tersebut berakar pada keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif, norma patriarki yang membatasi partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi, serta ketergantungan pada sumber energi tradisional yang memperbesar beban domestik perempuan dan mempersempit ruang bagi kemandirian ekonomi mereka (UNDP, 2024b; UNEP, 2020). UN Women mengidentifikasi bahwa intervensi ekonomi semata tidak cukup tanpa mendorong perubahan norma sosial yang menjadi akar hambatan tersebut.

Latar belakang utama dari fase pertama program ini (2018 - 2022) adalah adanya celah besar antara potensi ekonomi perempuan dengan akses mereka terhadap teknologi energi terbarukan. Bangladesh memiliki ketergantungan pada sumber energi tradisional tidak hanya menghambat produktivitas ekonomi perempuan, tetapi juga memperburuk kondisi kesehatan dan kemiskinan waktu (*time poverty*) akibat beban domestik yang tinggi (UNEP, 2020, Moser, 1993). Laporan UN Women

menekankan bahwa energi terbarukan bukan sekadar isu teknis lingkungan, melainkan instrumen strategis untuk membebaskan perempuan dari keterbatasan ekonomi domestik. Dengan menyediakan akses terhadap energi bersih, program ini berupaya menciptakan kemandirian ekonomi yang selama ini terhambat oleh struktur sosial yang tidak inklusif (UN Women, 2023).

Tujuan utama dari Program EmPower Fase 1 difokuskan pada tiga pilar strategis yang saling berkaitan untuk menciptakan perubahan sistemis. Pertama, program ini bertujuan untuk meningkatkan posisi tawar perempuan dalam pengambilan keputusan terkait perubahan iklim dan penggunaan energi di tingkat rumah tangga maupun komunitas. Kedua, EmPower menargetkan terciptanya akses ekonomi yang inklusif melalui kewirausahaan berbasis energi terbarukan yang memungkinkan perempuan memiliki pendapatan mandiri (Programme & Women, 2024). Ketiga, program ini berupaya membangun basis data dan kebijakan yang peka gender guna memastikan bahwa suara perempuan didengar dalam forum - forum kebijakan nasional maupun regional terkait iklim.

Secara lebih spesifik dalam konteks penelitian ini, tujuan EmPower diorientasikan untuk memicu internalisasi norma kesetaraan gender melalui pintu masuk pemberdayaan ekonomi. Melalui pelatihan teknis dan dukungan finansial, UN Women berupaya mengubah persepsi masyarakat mengenai kapabilitas perempuan dalam mengelola aset ekonomi produktif dan teknologi (UN Women, 2020). Keberhasilan program ini tidak hanya

diukur dari jumlah teknologi yang terpasang, tetapi dari sejauh mana terjadi pergeseran otoritas pengambilan keputusan dari dominasi laki - laki menuju relasi yang lebih setara (UNEP, 2022). Dengan demikian, tujuan akhir dari fase pertama ini adalah meletakkan fondasi bagi masyarakat yang resilien secara iklim sekaligus adil secara gender di wilayah pesisir.

### 2.3.2 Wilayah Intervensi dan Sasaran Program

Penentuan wilayah intervensi dalam Program EmPower Fase 1 di Bangladesh didasarkan pada tingkat hambatan ekonomi perempuan yang paling tinggi, yang secara geografis terkonsentrasi di distrik - distrik pesisir seperti Satkhira, Khulna, dan Bagerhat. Di wilayah tersebut, perempuan menghadapi kombinasi hambatan yang saling memperkuat yaitu norma patriarki yang membatasi partisipasi ekonomi, akses terbatas terhadap infrastruktur energi dan layanan keuangan, serta ketergantungan tinggi pada sumber daya alam yang bersifat musiman (UN Women, 2020). Kondisi geografis yang rentan terhadap siklon dan kenaikan permukaan laut memperparah hambatan tersebut, menjadikan kawasan ini sebagai prioritas strategis bagi UN Women untuk menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan kunci ketahanan masyarakat pesisir secara keseluruhan.

Sasaran utama dari program ini adalah perempuan pedesaan yang hidup di bawah garis kemiskinan dan memiliki akses terbatas terhadap pengambilan keputusan ekonomi di tingkat rumah tangga. UN Women menargetkan perempuan pengusaha mikro, petani perempuan, dan

kelompok rentan lainnya yang selama ini tidak tersentuh oleh bantuan finansial formal (UNEP, 2020). Melalui pendekatan inklusif, program ini tidak hanya memberikan modal tetapi juga memilih sasaran berdasarkan potensi mereka untuk menjadi agen perubahan dalam komunitas. Dengan memprioritaskan perempuan di wilayah marginal, UN Women berupaya memutus rantai kemiskinan dan ketergantungan yang selama ini memperburuk posisi tawar perempuan di hadapan struktur patriarki lokal.

Sasaran program juga mencakup kelompok masyarakat dan institusi lokal sebagai pendukung ekosistem pemberdayaan. Kelompok simpan pinjam komunitas dan organisasi masyarakat sipil di tingkat desa dilibatkan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat dikelola secara kolektif dan berkelanjutan (United Nations Bangladesh, 2021). Pembentukan kelompok-kelompok ini bertujuan menciptakan ruang aman bagi perempuan dalam berorganisasi dan meningkatkan literasi finansial mereka. Dengan memfokuskan pada penguatan institusi di tingkat lokal, UN Women memastikan bahwa norma kesetaraan yang dibawa oleh program tidak berhenti pada individu, tetapi tertanam dalam pola interaksi sosial di komunitas tersebut.

Program EmPower juga menyoal para pemangku kepentingan di tingkat kebijakan, termasuk pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat pria, sebagai sasaran sekunder namun krusial. Keterlibatan laki-laki dalam program ini menjadi bagian dari strategi untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan peran ekonomi perempuan yang dibawa oleh

UN Women (UN Women, 2023). Fokus sasaran pada pemegang otoritas lokal ini untuk memastikan bahwa dukungan terhadap agensi ekonomi perempuan mendapatkan legitimasi sosial dan politik di lapangan. Dengan demikian, cakupan sasaran program yang komprehensif ini dirancang untuk menciptakan perubahan perilaku yang menyeluruh, mulai dari tingkat domestik hingga tingkat kebijakan publik di Bangladesh.

### 2.3.3 Strategi dan Pendekatan UN Women dalam EmPower

Strategi utama yang diterapkan UN Women dalam Program EmPower Fase 1 adalah integrasi antara akses teknologi energi terbarukan dengan pengembangan kewirausahaan perempuan. Pendekatan ini didasarkan pada logika bahwa pemberian alat produksi berbasis energi bersih dapat memangkas biaya operasional sekaligus meningkatkan produktivitas usaha yang dikelola oleh perempuan (UNEP, 2020). Dengan memfasilitasi akses terhadap teknologi seperti pompa air bertenaga surya atau mesin pengolahan hasil tani, UN Women berupaya mentransformasi peran perempuan dari sekadar pekerja domestik menjadi aktor ekonomi yang memiliki nilai tawar lebih tinggi. Strategi ini dirancang untuk menciptakan kemandirian finansial yang menjadi fondasi utama bagi perempuan untuk keluar dari jebakan kemiskinan sistemik di wilayah pesisir.

UN Women juga menerapkan pendekatan penguatan kapasitas melalui pembentukan dan pendampingan kelompok simpan pinjam serta

koperasi perempuan. Melalui wadah kolektif ini, para peserta program diberikan pelatihan literasi keuangan, manajemen bisnis, dan kepemimpinan guna memastikan keberlanjutan unit usaha yang telah dibentuk (UN Women, 2020). Pendekatan kelompok ini juga berfungsi sebagai ruang aman (*safe space*) bagi perempuan untuk saling berbagi informasi dan memperkuat jaringan dukungan sosial. Dengan memiliki kontrol atas modal bersama, perempuan secara perlahan mulai mengikis ketergantungan finansial terhadap pihak ketiga atau dominasi anggota keluarga laki - laki, yang merupakan langkah awal menuju internalisasi norma kesetaraan di tingkat rumah tangga.

Internalisasi norma kesetaraan gender dalam Program EmPower juga dilakukan melalui strategi advokasi dan penyadaran komunitas yang sensitif terhadap budaya lokal. UN Women menyadari bahwa perubahan ekonomi tidak akan bertahan lama tanpa didukung oleh perubahan pola pikir masyarakat, sehingga program ini melibatkan tokoh agama dan pemimpin lokal dalam dialog mengenai hak - hak ekonomi perempuan (UN Women, 2023). Strategi ini bertujuan untuk membangun legitimasi sosial sehingga keterlibatan perempuan dalam ruang publik dan kegiatan ekonomi tidak dianggap sebagai ancaman terhadap nilai - nilai tradisional. Melalui pendekatan yang persuasif dan kolaboratif, UN Women berupaya menyisipkan nilai - nilai keadilan gender ke dalam struktur sosial masyarakat pesisir Bangladesh secara halus namun terukur.

Terakhir, UN Women menggunakan pendekatan berbasis data dan kebijakan untuk memastikan bahwa strategi di tingkat lapangan dapat direplikasi dalam skala yang lebih luas. Dengan mendokumentasikan keberhasilan perempuan dalam mengelola energi terbarukan, UN Women melakukan advokasi kepada Pemerintah Bangladesh agar menyusun kebijakan iklim yang lebih responsif gender (UNEP, 2022). Strategi ini memastikan bahwa suara perempuan dari pesisir tidak hanya berhenti pada level komunitas, tetapi juga mempengaruhi agenda pembangunan nasional. Pendekatan multidimensi ini mulai dari penyediaan alat produksi, penguatan konektivitas, hingga advokasi kebijakan menjadi kerangka kerja komprehensif UN Women dalam mengupayakan perubahan posisi tawar perempuan di Bangladesh.

#### 2.3.4 Mekanisme UN Women dalam Mengatasi Hambatan Selama Program

Pelaksanaan Program EmPower Fase 1 di pesisir Bangladesh menghadapi tantangan sistemik yang berakar pada kuatnya norma patriarki dalam struktur sosial masyarakat setempat. Salah satu hambatan utama yang diidentifikasi oleh UN Women adalah adanya pembatasan akses perempuan terhadap mobilitas dan ruang publik, yang seringkali mengharuskan mereka mendapatkan izin dari anggota keluarga laki - laki untuk berpartisipasi dalam pelatihan ekonomi (UN Women, 2020). Hal ini menciptakan celah antara ketersediaan program dengan tingkat partisipasi riil di lapangan. Meskipun bantuan teknologi energi terbarukan telah

disediakan, norma budaya yang menempatkan laki - laki sebagai pengelola utama aset produktif menyebabkan perempuan sulit untuk memiliki otoritas penuh atas bantuan yang mereka terima.

Keterbatasan literasi finansial dan teknis di kalangan perempuan pesisir menjadi hambatan operasional yang signifikan bagi UN Women. Banyak penerima manfaat yang belum pernah bersentuhan dengan teknologi energi terbarukan atau sistem manajemen bisnis modern sebelumnya, sehingga proses adaptasi memerlukan waktu yang lebih lama dari yang direncanakan (UNEP, 2020). Kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan formal di wilayah marginal, yang membuat materi instruksional program harus disesuaikan secara berulang agar dapat dipahami oleh masyarakat lokal. Hambatan kapasitas ini menunjukkan bahwa intervensi ekonomi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya pendampingan edukatif yang intensif dan berkelanjutan.

Tantangan geografis dan infrastruktur di wilayah pesisir juga menjadi kendala fisik yang menghambat kelancaran distribusi program. Wilayah seperti Satkhira dan Khulna seringkali mengalami bencana alam musiman yang merusak infrastruktur energi yang baru saja dipasang, sehingga memaksa UN Women untuk mengalokasikan sumber daya tambahan guna perbaikan dan pemeliharaan (UN Women, 2023). Selain itu, buruknya akses transportasi ke desa - desa terpencil menyebabkan biaya logistik meningkat dan menghambat tim lapangan dalam melakukan monitoring rutin. Dinamika alam yang tidak menentu ini menuntut

fleksibilitas tinggi dalam perencanaan anggaran dan jadwal implementasi program di Bangladesh.

Terakhir, munculnya resistensi dari sebagian tokoh masyarakat dan kepala rumah tangga laki - laki terhadap perubahan peran gender menjadi hambatan ideologis yang serius. Terdapat kekhawatiran di tingkat komunitas bahwa kemandirian ekonomi perempuan akan mengganggu stabilitas tatanan keluarga tradisional yang telah mapan selama berabad - abad (UNEP, 2022). Fenomena *culture of silence* atau budaya diam di kalangan perempuan juga seringkali menghalangi mereka untuk melaporkan kendala yang mereka hadapi di tingkat domestik kepada pendamping program.

Guna mengatasi hambatan tersebut, UN Women melakukan serangkaian intervensi yang berfokus pada pelibatan aktor strategis di tingkat lokal. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyelenggarakan dialog komunitas yang secara khusus menyoal para suami, tokoh agama, dan pemimpin desa. Upaya ini dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai manfaat ekonomi dari Program EmPower bagi kesejahteraan keluarga secara kolektif (UN Women, 2023). Melalui pendekatan ini, UN Women berupaya memitigasi potensi resistensi sosial dan membangun dukungan dari lingkungan domestik agar para perempuan peserta program mendapatkan izin serta ruang untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi dan penggunaan teknologi energi terbarukan di ruang publik.

UN Women juga merespon kendala teknis dengan mengadaptasi materi pelatihan agar lebih sesuai dengan tingkat literasi dan kondisi geografis masyarakat pesisir. UN Women memfasilitasi pembentukan teknisi lokal dan kelompok pemeliharaan infrastruktur yang dikelola oleh komunitas untuk menjamin keberlangsungan alat produksi pasca - bencana (UNEP, 2020). Pendekatan ini merupakan bagian dari strategi program untuk membangun kemandirian lokal dalam pengelolaan energi, sehingga hambatan teknis di lapangan dapat ditangani secara cepat tanpa harus menunggu bantuan dari pusat. Upaya - upaya penanggulangan ini dijalankan secara paralel untuk memastikan bahwa tujuan pemberdayaan ekonomi tetap berjalan meskipun dihadapkan pada tantangan struktural yang kompleks di Bangladesh.